

Implementasi Kebijakan Akademik Tentang Proses Belajar Mengajar (PBM) di Universitas Bojonegoro

Henry Suhindarno¹, Mochtar Setijohadi²

Universitas Bojonegoro

hsuhindarno@gmail.com¹, mochtarsetijohadi99@gmail.com²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan akademik tentang proses belajar mengajar (PBM) di Universitas Bojonegoro. Jenis penelitian ini adalah deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses implementasi akademik Proses Belajar Mengajar (PBM) di Universitas Bojonegoro adalah meliputi: Interpretasi kebijakan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bojonegoro, turunan aturannya, sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana, sosialisasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan capaian kinerja Pelaksanaan. Sementara faktor-faktor internal yang menghambat implementasi kebijakan meliputi: belum adanya panduan teknis pelaksanaan, yang mempengaruhi pemahaman, sikap dan perilaku pelaksana dan eksternal adalah tidak ada peraturan dari pemerintah yang secara khusus mengatur pelaksanaan akademik tentang Proses Belajar Mengajar (PBM) di tingkat perguruan tinggi serta Partisipasi masyarakat lingkungan Universitas Bojonegoro untuk mendukung kegiatan akademik.

Kata kunci: **Implementasi; Kebijakan; Proses Belajar; Mengajar**

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation and factors that support and hinder the implementation of academic policies regarding the teaching and learning process (PBM) at Bojonegoro University. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The results of the study indicate that the academic implementation process of the Teaching and Learning Process (PBM) at Bojonegoro University includes: Policy interpretation based on the Rector's Decree of Bojonegoro University, its derivative regulations, human resources, budget, and facilities and infrastructure, policy socialization, policy implementation, and performance achievement. Meanwhile, internal factors that hinder policy implementation include: the absence of technical implementation guidelines, which affect the understanding, attitudes, and behavior of implementers; and external factors are the absence of government regulations that specifically regulate the academic implementation of the Teaching and Learning Process (PBM) at the university level and community participation within the Bojonegoro University environment to support academic activities.

Keywords: Implementation; Policy; Learning Process; Teaching

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang esensial, bahkan merupakan salah satu elemen penting bagi kehidupan manusia. Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, terampil, terbuka, mandiri dan demokratis. Dan salah satu lembaga pendidikan adalah perguruan tinggi, perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan merupakan tempat dimana proses belajar mengajar dilakukan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis. Dalam kegiatannya, Perguruan Tinggi adalah tempat yang bukan hanya sekedar tempat berkumpul dosen dan mahasiswa, melainkan berada dalam suatu sistem yang rumit dan saling berkaitan. Oleh karena itu, Perguruan tinggi dipandang sebagai suatu institusi/lembaga pendidikan. Perguruan tinggi mengelola sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan menghasilkan lulusan sarjana yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, serta gilirannya lulusan perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan masyarakat. (Nur Cholis, 2003).

Perguruan tinggi merupakan institusi yang memiliki peran dan posisi strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan secara makro yang perlu melakukan upaya perbaikan secara terus menerus untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Keberadaan manusia sebagai sumber daya sangat penting dalam suatu perguruan tinggi karena sumber daya manusia menunjang melalui karya, bakat, kreativitas, dorongan, dan peran nyata. Tanpa adanya unsur manusia dalam perguruan tinggi, tidak mungkin perguruan tinggi tersebut dapat bergerak dan menuju yang diinginkan.

Sebagaimana diungkapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Bab I pasal 1 dinyatakan bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara". (UU. RI. No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Pada kenyataannya pendidikan bukanlah suatu upaya yang sederhana, melainkan suatu kegiatan yang dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan akan selalu berbuah seiring dengan perkembangan zaman. Setiap saat pendidikan akan selalu menjadi perhatian dan bahkan tak jarang sasaran ketidakpuasan karena

pendidikan menyangkut intervensi dan kondisi kehidupan dimasa yang akan datang, juga menyangkut kondisi dan suasana kehidupan saat ini. Itulah sebabnya pendidikan memerlukan perhatian khusus yang menjadi tanggungjawab kita bersama, baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bab. I pasal 1 ayat 2 dituangkan Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doctor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Dan pada ayat 9 Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (UU. RI. No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, 2012)

Jadi dapat disimpulkan bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia mempunyai kewajiban serta misi yang sama, yaitu meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam menunjang keberhasilan proses belajar mengajar pada suatu perguruan tinggi. Proses belajar mengajar di perguruan tinggi merupakan bentuk pelaksanaan dari dharma pertama Tri Dharma tersebut yaitu pendidikan. Dengan demikian ukuran keberhasilan suatu perguruan tinggi telah melaksanakan dharma pertama dengan baik tercermin dari keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan Akademik atau proses belajar mengajar dengan baik.

Banyak hal yang menjadi komponen dalam menunjang kegiatan Akademik pada suatu perguruan tinggi. Misalnya saja, tersedianya sarana dan prasarana pendidikan. Frekuensi kehadiran dosen dalam mengajar atau mahasiswa dalam menerima kuliah dan ujian, serta hal lain yang bersifat non teknis. Misalnya saja kesediaan mahasiswa dalam menerima materi kuliah. Persoalannya adalah bagaimana proses implementasi / pelaksanaan kegiatan akademik terutama proses Belajar mengajar di suatu perguruan tinggi itu dikatakan berhasil baik. Yang pasti sebagai indikator utama adalah memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperoleh Akreditasi, antara lain: 1) Akreditasi oleh masyarakat dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Keputusan BAN-PT Depdiknas. RI. No.002/SK/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Peringkat Akreditasi Program Studi Jenjang

Sarjana), 2) Akreditasi oleh Pemerintah / Ijin Penyelenggaraan Program Studi, dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Keputusan Mendiknas. RI. No.184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi), melalui proses Pelaporan per Semester (EPSBED/PDPT), 3) Dengan melihat jumlah peminat calon mahasiswa baru yang masuk, 4) Banyaknya lulusan yang diterima kerja pada dinas/institusi pemerintah maupun non pemerintah.

Selain itu perlu diketahui pula faktor pendorong dan penghambat implementasi / pelaksanaan kebijakan Akademik tentang Proses belajar mengajar di suatu perguruan tinggi, karena faktor-faktor tersebut yang akan mempengaruhi peluang untuk berhasil atau gagal mencapai tujuan. Misalnya saja sumber daya yang tersedia baik itu berupa biaya, material, waktu dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan hal ini dihadirkanlah salah satu pemikiran ke arah pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada perguruan tinggi untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara mandiri yang diharapkan mampu mengangkat perguruan tinggi dari keterpurukannya dan dapat memecahkan berbagai persoalan pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan kita, Dorongan untuk menemukan solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul tidak saja berasal dari adanya kebutuhan subyektif untuk makin meningkatkan mutu pendidikan yang diselenggarakan, tetapi juga oleh adanya tuntutan perkembangan masa depan masyarakat kita dalam rangka menyiapkan generasi penerus yang berkualitas dan bermoral. (Muhaimin, 1991)

Keinginan pemerintah yang dituangkan dalam haluan negara agar pengelolaan pendidikan diarahkan pada arah desentralisasi dan otonomi menuntut partisipasi masyarakat secara aktif sebagai konsekuensi logis atas diberlakukannya otonomi daerah. Karena itu diperlukan kesiapan perguruan tinggi, yang menjadi ujung tombak pelaksanaan operasional pendidikan pada garis atas. Pendidikan yang selama ini dikelola secara terpusat (sentralisasi) harus diubah guna mengikuti irama yang sedang berkembang dimana otonomi daerah sebagai kebijakan politik di tingkat makro akan memberi imbas terhadap otonomi perguruan tinggi sebagai sistem pendidikan nasional. (E. Mulyasa, 2002)

Dari sini, bisa dilihat bahwa negara ini masih dapat bangun dan berkembang menjadi negara besar dengan sumber daya manusia dan humanisme yang tinggi bila seolah-olah diberdayakan, ditingkatkan mutunya dan diubah sistem

pengelolaannya dengan menggunakan pendekatan kebutuhan (*demand approach*) melalui manajemen berbasis kompetensi. Otonomi sistem serta pengelolaan pendidikan ini dilakukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukannya memindahkan atau mengabaikan masalah pendidikan yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten dan kota. Momentum seperti ini jika tidak disikapi dengan segera akan membuat dunia pendidikan ketinggalan dan terkesan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, bahkan akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi lembaga pendidikan itu sendiri.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi sesuai dengan tujuan pendidikan, maka peran serta sivitas akademika, stakeholders, dan keterlibatan masyarakat untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) atau Rencana Strategi (Renstra) sangatlah perlu bagi perkembangan perguruan tinggi itu sendiri, kata lain membangun hubungan yang saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*).

Hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat sangat besar manfaat dan artinya bagi kepentingan pembinaan dukungan moral, material dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar. Sedangkan bagi masyarakat dapat mengetahui berbagai hal mengenai perguruan tinggi dan azas manfaat yang dihasilkan, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan, melakukan tekanan dan tuntutan terhadap lembaga pendidikan. Untuk kepentingan tersebut, dapat dilakukan berbagai teknik dan media seperti mengadakan seminar atau diskusi panel, buletin kampus dan kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan yang bermanfaat bagi peserta didik maupun keterlibatan orang tua.

Dari latar belakang pengertian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah Tesis terhadap implementasi / pelaksanaan Kebijakan Akademik tentang Proses Belajar Mengajar (PBM) yang dilaksanakan oleh Universitas Bojonegoro, dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan proses tersebut yang tertuang di dalam Visi, Misi dan Tujuannya. Universitas Bojonegoro (UNIGORO) sebagai sebuah perguruan tinggi swasta di bawah naungan Yayasan Suyitno mengelola 5 (lima) fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang juga melaksanakan proses akademiknya sesuai sasaran dan tujuan yang hendak dicapainya dalam Keputusan Rektor Universitas Bojonegoro Nomor 25 / SKEP / III / 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bojonegoro.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang serta perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu tersebut secara menyeluruh (*holistic*) (Lexy J. Moleong, 2022).

Adapun fokus penelitian lebih ke arah Implementasi kebijakan Akademik tentang Proses Belajar Mengajar (PBM) di Universitas Bojonegoro serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kebijakan tersebut.

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang diperkirakan mempunyai informasi terkait dengan persoalan yang hendak diteliti. Sumber data dibagi menjadi tiga, yaitu sumber data yang berupa orang (person), dokumen (paper), dan kondisi atau keadaan (place) dalam hal ini, Universitas Bojonegoro, sumber data yang berupa orang meliputi : pimpinan Universitas, Pegawai Universitas melalui observasi dan wawancara dilokasi penelitian (survei). Sedangkan data yang berupa dokumen adalah monografi Universitas Bojonegoro. Sedangkan sumber data yang berupa kondisi atau keadaan meliputi kondisi geografis, kondisi pendidikan serta kondisi berkaitan dengan fokus penelitian.

Tabel 1
Inventarisasi Sumber Data Primer dan Data Sekunder Penelitian

No	Fokus Penelitian	Sumber Data		Jumlah (orang)
		Data Primer/ Informan	Data Sekunder/ dokumen	
1	2	3	4	5
1	Implementasi Kebijakan Akademik tentang Proses Belajar Mengajar (PBM) di Universitas Bojonegoro	1. Rektor	- Keputusan Rektor Universitas Bojonegoro Nomor 25 / SKEP / III / 2008	1
		2. Purek I		1
		3. Pudek I		5
		4. Staf TU Bag. pendidikan	tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bojonegoro,	5
			- Buku Pedoman Akademik Fakultas	

			tentang Proses Belajar Mengajar	
2	Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Akademik tentang Proses Belajar Mengajar (PBM) di Universitas Bojonegoro	1. Rektor 2. Purek II 3. Pudek I 4. Staf TU bagian Pendidikan.	Keban, Yeremeis T., 2004, <i>Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: KOnsep, Teori Dan Isu</i> , Yogyakarta, Gava Media.	1 1 5 5

Sumber: diolah penulis 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi Kebijakan Akademik tentang Proses Belajar Mengajar (PBM) di Universitas Bojonegoro

Sesuai dengan fokus penelitian bahwa dimensi atau aspek yang dikaji atau dilihat dalam Implementasi kebijakan Akademik tentang Proses Belajar Mengajar (PBM) di Universitas Bojonegoro meliputi (1) Interpretasi kebijakan; (2) Organisasi pelaksana kebijakan; (3) Dukungan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, keuangan/anggaran dan sarana prasarana, (4); Pelaksanaan/penerapan kebijakan, yang meliputi sosialisasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan capaian Kinerja Pelaksanaan.

Interpretasi Kebijakan

Interpretasi kebijakan adalah langkah awal dari proses implementasi kebijakan, yaitu menjabarkan, membuat aturan turunannya (menderivasi) sehingga kebijakan itu menjadi operasional. Dalam kaitannya dengan kebijakan Akademik tentang Proses Belajar Mengajar (PBM) Universitas Bojonegoro yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Bojonegoro Nomor 25 / SKEP / III / 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bojonegoro, langkah interpretasi adalah menjabarkan, membuat aturan turunannya atau sering disebut aturan pelaksanaannya, membuat standar operasional prosedur dan sebagainya.

Dalam Keputusan Rektor Universitas Bojonegoro Nomor 25 / SKEP / III / 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bojonegoro.

Sesuai penyampaian dari Rektor Universitas Bojonegoro bahwa “Untuk keseragaman pelaksanaannya, Pembantu Rektor I bagian Akademik universitas Bojonegoro yang melimpahkan sebagian kewenangannya akan memberikan pedoman teknis penerapan di masing-masing Fakultas dan bantuan SDM”.

Ketentuan tersebut sudah jelas menyebutkan bahwa dalam rangka implementasi Keputusan Rektor Universitas Bojonegoro Nomor 25 / SKEP / III / 2008 akan diberikan pedoman teknik penerapan/pelaksanaan tentang Proses Belajar Mengajar (PBM). Namun bagaimana kenyataan dan apa yang digunakan untuk pedoman/panduan pelaksanaan di masing-masing Fakultas? Untuk itu, perlu kita telusuri dari birokrat yang terkait maupun dokumentasi-dokumentasi yang ada.

Organisasi Pelaksana Kebijakan

Organisasi diperlukan agar suatu kebijakan dapat dilaksanakan. Organisasi pelaksana kebijakan adalah merupakan kelompok orang atau aktor yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan, yang meliputi bentuk dan struktur organisasi serta tata kerjanya. Berkaitan dengan hal tersebut, temuan di lapangan menunjukkan bahwa dalam rangka mengimplementasikan kebijakan akademik tentang Proses Belajar Mengajar (PBM), kepala biro akademik berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bojonegoro Nomor 25 / SKEP / III / 2008, tidak membentuk organisasi baru semacam Tim Pelaksana kebijakan, tetapi menggunakan organisasi yang sudah ada, yaitu organisasi dari masing-masing Fakultas. Dalam organisasi tersebut, sudah tersusun struktur organisasinya maupun pembagian tugas dan fungsinya. Sehingga tinggal membagi kewenangan pelayanan di bidang administrasi akademik yang didelegasikan kepada kepala biro administrasi akademik tersebut kepada seksi-seksi yang terkait dengan tugas dan fungsinya yaitu Pembantu Dekan I di tingkat Fakultas yang nantinya akan diakumulasikan ke kepala Biro Akademik Universitas.

Dukungan Sumber Daya

Dukungan sumber daya yang diperlukan agar pelaksanaan kebijakan mempunyai kemampuan/kapasitas untuk melaksanakan tugas yang diemban tersebut. Namun fenomena di Universitas Bojonegoro, yaitu bahwa pelaksanaan administrasi akademik belum sepenuhnya disertai dengan adanya dukungan sumber daya atau sering yang disebut dengan istilah P3D (Personil, Pembiayaan, Prasarana dan Sarana serta Dokumen). Padahal dukungan sumber daya tersebut sangat penting dan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan

implementasi suatu kebijakan (Anderson, 1979, Ripley, 1985 dan Edwards III, 1980). Karena itu, hal ini merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh Universitas Bojonegoro dalam mengimplementasikan kebijakan akademik tentang Proses Belajar Mengajar (PBM) yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Bojonegoro Nomor 25 / SKEP / III / 2008. Langkah yang ditempuh adalah memanfaatkan sumber daya yang ada yang relatif terbatas keberadaannya. Untuk masalah personil serta pembiayaan belum menjadi suatu permasalahan yang berat, namun untuk faktor prasarana dan sarana inilah yang merupakan masalah yang sangat dirasakan

Oleh karena itu, dalam rangka Keputusan Rektor Universitas Bojonegoro Nomor 25 / SKEP / III / 2008 terkait pelaksanaan akademik tentang Proses Belajar Mengajar (PBM), perlu disertai dengan dukungan sumber daya yang memadai, agar implementator kebijakan mempunyai kemampuan/kapasitas untuk menjalankan kebijakan secara baik seperti yang diharapkan.

Pelaksanaan/Penerapan Kebijakan

Sosialisasi Kebijakan

Sosialisasi atau diseminasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk menyebarluaskan dan mengkomunikasikan kebijakan kepada kelompok sasaran. Tujuannya adalah agar kelompok sasaran kebijakan mengetahui, memahami, menerima dan melaksanakan kebijakan. Atau secara umum sering disebut bahwa komunikasi kebijakan ini untuk menumbuhkembangkan partisipasi kelompok sasaran kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan Rogers dan Shoemaker (1981) bahwa keputusan seseorang untuk menerima/melaksanakan atau menolak/tidak melaksanakan sesuatu hal yang baru (inovasi) diawali dengan tahap pengenalan terhadap hal yang baru (inovasi) tersebut. Oleh karena itu, kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan/penerapan suatu kebijakan berkaitan erat dengan upaya mensosialisasikan/mendesiminasi kebijakan tersebut kepada pelaku kebijakan, terutama pada kelompok sasaran yang hendak dituju.

Berkaitan dengan aktivitas sosialisasi/desiminasi tersebut, temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi/desiminasi kebijakan administrasi akademik Hanya ada sosialisasi secara tertulis dan belum dilakukan secara tatap muka/komunikasi langsung.

Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM)

1. Persiapan Pendaftaran

Persiapan pendaftaran merupakan langkah awal mahasiswa untuk melakukan pendaftaran dalam rangka menentukan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa

dalam semester yang akan berlangsung. Oleh karena itu pada setiap semester selalu ada tahap pendaftaran. Sebelum pendaftaran dimulai perlu adanya persiapan yang mendahuluinya. Seperti yang dikemukakan oleh staf TU pada data penelitian bahwa Setelah mendapat persetujuan dari Rektor, Dekan mengatur perencanaan dan pelaksanaan sistem kredit semester. Disini mahasiswa bersiap-siap untuk melakukan pendaftaran untuk menentukan matakuliah yang akan diambil per semesternya. Persiapan pendaftaran ini dapat dilakukan di staf Tata Usaha fakultas dengan tahapan pertama-tama staf Tata Usaha memberikan petunjuk pengisian daftar nama penasihat akademik serta cara pengisian kartu rencana studi dan kartu hasil studi.

2. Pendaftaran / pengisian Kartu Rencana Studi

Pendaftaran / pengisian Kartu Rencana Studi bisa dilakukan dengan alur sesuai yang dikemukakan staf tata usaha yaitu mahasiswa yang sudah diberi petunjuk dan mengerti tata cara pengisian kartu rencana studi, untuk mahasiswa baru wajib mengisi beban studi yang sudah ditetapkan dalam kartu rencana studi semester pertama. Untuk mahasiswa lama penentuan rencana studi semester ditentukan oleh indeks prestasi yang dicapai oleh mahasiswa pada semester sebelumnya dengan persetujuan PA. Selanjutnya bagi mahasiswa yang ingin melakukan pembatalan mata kuliah diberi kesempatan selambat-lambatnya pada minggu ke delapan setelah perkuliahan berlangsung sesuai kalender akademik yang sudah disetujui oleh ketua jurusan / Pembantu Dekan I.

3. Kuliah, seminar dan sejenisnya.

Mahasiswa yang telah melakukan pengisian KRS dan KHS wajib mengikuti proses pembelajaran / perkuliahan , seminar-seminar, dan kegiatan akademik lainnya sesuai rencana studi semesternya dan presensi mahasiswa akan selalu dimonitoring oleh dosen dan ketua jurusan. Bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti kuliah, seminar, dengan tertib dan teratur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan jumlah kegiatan tersebut kurang dari 75%, mahasiswa tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh ketua jurusan / Pudek I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro.

Capaian Kinerja Pelaksanaan

Capaian Kinerja Pelaksanaan akademik tentang Proses Belajar Mengajar (PBM) di Universitas Bojonegoro, sesuai hasil Data Penelitian menggunakan parameter atau kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja Pelaksanaan meliputi (1) kualitas (2) kuantitas (3) ketepatan waktu (4) penghematan biaya (5)

kemandirian atau otonomi dalam bekerja (tapa selalu disupervisi) dan (6) kerjasama (lihat Bernardin & Russel, 1993).

Berdasarkan catatan para nara sumber, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kualitas

Para pelaksanaan kebijakan diharapkan mampu memberikan pelayanan baik itu kepada mahasiswa, sejauh ini Proses Belajar Mengajar (PBM) di Universitas Bojonegoro Sudah berjalan Cukup baik meskipun ada beberapa kendala yang mungkin menghambat proses, hal tersebut tidak menjadikan para pelaksana kebijakan lengah dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa khususnya”.

2. Kuantitas

Kalau semua tugas yang dilaksanakan di Fakultas terkait Proses Belajar Mengajar (PBM) baik, Maka semakin banyak pula antusias mahasiswa, dosen maupun pegawai Universitas yang mendukung dan terlibat secara aktif dalam Proses Belajar Mengajar (PBM), Namun tidak Halnya yang terjadi di Universitas Bojonegoro untuk Mahasiswa yang aktif masih terhitung Sedang.

3. Ketepatan Waktu

Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) belum sepenuhnya tepat pada waktunya, hal tersebut dikarenakan ada kendala yang sedikit memperlambat kegiatan seperti ada mahasiswa yang menunda atau cuti kuliahnya.

4. Penghematan Biaya

Terkait Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) penghematan biaya meskipun Fakultas memiliki anggaran tersendiri yang cukup dan mungkin lebih guna pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM).

5. Kemandirian atau Otonomi dalam Bekerja

Pembantu Dekan I selaku kepala bidang Akademik di tingkat Fakultas mengkoordinir sebaik mungkin organisasi didalamnya dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) agar bisa mandiri dalam bekerja. karena tidak mungkin Fakultas akan menyerahkan tugas tersebut kepada Lembaga Pusat dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM)”

6. Kerjasama

Kerjasama yang baik sangat membantu tugas yang terkait antara Lembaga Pusat Universitas Bojonegoro dan Fakultas yang ada sebagai pelaksana kebijakan Akademik terutama Proses Belajar Mengajar (PBM). selama ini kerja sama Lembaga Pusat Universitas dan Fakultas dalam pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) sudah berjalan dengan baik”

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Administrasi Akademik Universitas Bojonegoro

a. Faktor pendukung

Adapun faktor pendukung sesuai dengan data hasil penelitian yang disampaikan oleh informan bahwa ada dua jenis, yakni (1) faktor pendukung internal institusi Universitas yang meliputi : Komitmen pelaksana administrasi akademik untuk meningkatkan kualitas kegiatan di bidang administrasi akademik, Pendidikan dan pengalaman kerja serta dedikasi pelaksana kebijakan administrasi akademik yang baik. (2) faktor pendukung eksternal Institusi Universitas yang meliputi: Adanya dukungan dari masyarakat di lingkungan Universitas Bojonegoro, Adanya kebijakan atau peraturan perundangan yang mendukung tentang pelaksanaan administrasi akademik tentang Proses Belajar Mengajar di Universitas.

b. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat sesuai dengan data hasil penelitian yang disampaikan oleh informan bahwa ada dua jenis, yakni (1) faktor penghambat internal institusi Universitas yang meliputi: Belum adanya panduan teknis pelaksanaan, sehingga mempengaruhi pemahaman, sikap dan perilaku pelaksana di Universitas Bojonegoro dalam mengimplementasikan kebijakan administrasi akademik. Kurang sumber daya keuangan. Kurang diadakan sosialisasi kepada pelaksana kebijakan. (2) faktor penghambat eksternal Institusi Universitas yang meliputi: tidak ada peraturan dari pemerintah yang secara khusus mengatur pelaksanaan administrasi akademik tentang Proses Belajar Mengajar di tingkat perguruan tinggi serta Partisipasi masyarakat lingkungan Universitas Bojonegoro untuk mendukung kegiatan administrasi akademik tentang Proses Belajar Mengajar.

SIMPULAN

Setelah melakukan penelaahan data-data penelitian dan komentar-komentar beberapa praktisi pendidikan untuk bahan perbandingan kajian sebagaimana teruraikan maka dapat disimpulkan: (1) Implementasi Kebijakan akademik tentang Proses Belajar Mengajar (PBM) di Universitas Bojonegoro adalah berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bojonegoro Nomor 25 / SKEP / III / 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bojonegoro; (2) Proses implementasi akademik Proses Belajar Mengajar (PBM) di Universitas Bojonegoro adalah meliputi : Interpretasi kebijakan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bojonegoro Nomor 25 / SKEP / III / 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bojonegoro yang kemudian dibuat turunan aturannya

dalam Buku pedoman Akademik untuk masing – masing Fakultas, Pembuatan Organisasi penyelenggara Akademik di lingkungan Fakultas, Dukungan Sumber Daya berupa sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana, dan yang terakhir Pelaksanaan kebijakan Akademik tentang Proses Belajar Mengajar (PBM)meliputi sosialisasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan capaian kinerja Pelaksanaan; (3) Ada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Administrasi akademik universitas Bojonegoro yang bersifat internal dan eksternal. (1) faktor penghambat internal institusi Universitas yang meliputi: Belum adanya panduan teknis pelaksanaan, sehingga mempengaruhi pemahaman, sikap dan perilaku pelaksana di Universitas Bojonegoro dalam mengimplementasikan kebijakan akademik tentang Proses Belajar Mengajar (PBM). Kurang sumber daya keuangan. Kurang diadakan sosialisasi kepada pelaksana kebijakan. (2) faktor penghambat eksternal Institusi Universitas yang meliputi: tidak ada peraturan dari pemerintah yang secara khusus mengatur pelaksanaan akademik tentang Proses Belajar Mengajar (PBM) di tingkat perguruan tinggi serta Partisipasi masyarakat lingkungan Universitas Bojonegoro untuk mendukung kegiatan akademik.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka dapat disarankan sebagai berikut: (1) Sebaiknya segera diadakan sosialisasi dan komunikasi secara langsung tentang kebijakan akademik tentang Proses Belajar Mengajar (PBM) universitas yang nantinya akan dapat menambah kelancaran proses implementasi. Dalam menggarap kegiatan sosialisasi dan komunikasi tersebut, hendaknya tidak terlalu terpaku satu cara dan pendekatan tertentu. Perpaduan komunikasi dengan pendekatan langsung melalui pertemuan kelompok, anjang sara maupun forum tatap muka lainnya; (2) Hendaknya dukungan sumber daya dalam pelaksanaan administrasi akademik ditingkatkan baik dalam hal sumber daya manusia, anggaran maupun sarana prasarana, namun di Universitas Bojonegoro ini perlu sekali ditingkatkan dukungan sarana dan prasarana di setiap fakultas di bidang akademik Proses Belajar Mengajar (PBM) khususnya; (3) sebaiknya Untuk merumuskan faktor kunci keberhasilan, selalu melakukan langkah analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk memperoleh serangkaian strategi terhadap faktor pendukung dan penghambat kebijakan akademik tentang Proses Belajar Mengajar (PBM) Universitas Bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

Andersen, E. James, 2019, *Public Policy-Making*, Third Edition. New York, Holt, Rinchart and Winston.

- Azwar, Saifuddin, , 2018, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Donald P. Warwick, 2021, *“Integrating planning and implementation: A transactional approach “*
- Dunn, N., William, 2019, *Public Policy Analysis: An Introduction*. Edisi Ke-2, Engelwood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., A Simon & Schuster Co., Terjemahan dari Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C, 1998, *Implementasi Public Policy, Congressional Quarterly Press, Washington DC*.
- Ichsan, Fuad, 2014 *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Isamy, M. Irfan, 2015, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Bumi Aksara.
- Keban, Yeremeis T., 2014, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: KOnsep, Teori Dan Isu*, Yogyakarta, Gava Media.
- Majid Abdul, 2015, *Perencanaan Pembelajaran (Mengembangkan kompetensi guru)*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mazmaman, Daniel H. dan Sabatier, Paul A., 2019, *Implementation and Public Policy*, New York, Harper Collins.
- Moleong, Lexy. J, 2022, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, Hadari, 2019, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung,
- Parson, Wayne, 2016, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, Jakarta: Kencana.
- Rogers, Everett M. & Floyd Sholmaker, 2019, *Komunikasi Inovasi, Suatu Pendekatan Lintas Kultural*, DiIndonesiakan oleh Helmi Kremlin dan Mochtar Effendi, Yogyakarta, Kelompok Diskusi Erasi Mahasiswa UGM.
- Salusu, 2022; *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Jakarta, Grasindo.
- Sarlito, Irawan, 2019 *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Schoderbek, Peter P. 2015, *Management*, San Diego; Harcourt Broce Javano Vich,
- Smith, William, A. 2011, *Conscientizacao tujuan pendidikan paulo freire*, Yogyakarta: Pustaka Belajar Bekerjasama dengan Read book.
- Suharsimi Arikunto, 2019, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Sutardji, 2022, Disertasi *Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Publik*, Universitas Brawajaya : Malang.
- Sutrisno, Loekman, 2016, *menuju masyarakat partisipatif*, Yogyakarta: Kanisius.
- Wahab, Abdullah, *Analisis Kebijakan dari Formula Keimplementasian Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004.
- Syaukani, Affan Gaffar dan Riyaas Rasyid, 2022, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Thompson, James D., 2018, *Organizations in Action: Social Science Bases of Administrative Theory*, New York, Mc Graw-Hill.
- Van Meter, Donalds & Care E. Van Horn, 2017, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Frame work", *Administration and Society*, Vol 6 No. 4, Sage Publication.
- Wibawa, 2019, Samudra, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta, PT.Grafindo Persada.
- Wilson, James Q, 2018, *Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do it*, Basic Books, United States of America.